



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PARIWISATA KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 4-6 DESEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
12. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020 mengenai keputusan kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata ke Kabupaten Sumedang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ini adalah untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat selama Pandemi COVID-19 dan *New Normal*. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris sebagai rujukan dalam pengambilan dan penentuan kebijakan, khususnya dalam bidang pariwisata.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

NO	NO ANGG	NAMA	FRAKSI/ JABATAN	DAPIIL
1.	A-12	H. SYAIFUL HUDA	PKB/ KETUA KOM X	JABAR VII
2.	A-338	Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP	PG/ WATUA KOMISI X	KALTIM
3.	A-227	RANO KARNO, S.IP	PDIP/ ANGGOTA	BANTEN III
4.	A-215	M. GURUH SUKARNO PUTRA	PDIP/ ANGGOTA	JATIM VI
5.	A-316	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI	PG/ ANGGOTA	JATIM IV
6.	A-339	ADRIAN JOPIE PARUNTU	PG/ ANGGOTA	SULUT
7.	A-88	IR. H. NUROJI	PGERINDRA/ ANGGOTA	JABAR VI
8.	A-117	ALI ZAMRONI, S.Sos	PGERINDRA/ ANGGOTA	BANTEN I
9.	A-365	RIAN FIRMANSYAH, S.Pd.	PNASDEM/ ANGGOTA	JABAR II
10.	A-7	Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.	PKB/ ANGGOTA	LAMPUNG I
11.	A-566	ANITA JACOBA GAH, S.E.	PD/ ANGGOTA	NTT II
12.	A-427	Hj. LEDIA HANIFA, A, S.Si, M.Psi. T	PKS/ ANGGOTA	JABAR I
13.	A-419	H. MUSTAFA KAMAL, S.S	PKS/ ANGGOTA	SUMSEL I
14.	A-518	MITRA FAKHRUDDIN, MB, S.P	PAN/ ANGGOTA	SULSEL III
SEKRETARIAT				
15.	-	DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.	KABAG SETKOM X DPR RI	
16.	-	MULYANA, S.Sos.	SEKRETARIAT KOMISI X DPR RI	
17.	-	AGOM HERLANI	SEKRETARIAT KOMISI X DPR RI	

18.	-	Dr. KHALILAH	TENAGA AHLI KOMISI X DPR RI
19.	-	KHAERUL ANAM	TENAGA AHLI KOMISI X DPR RI
20.	-	NAEFUROJI	BAG. PEMBERITAAN SETJEN DPR RI
21.	-	RANGGA WIJAYA	BAG. TV PARLEMEN SETJEN DPR RI
22.	-	DINDIN MAHMUDIN	BAG. KENDARAAN SETJEN DPR RI

Kunjungan kerja juga didampingi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, yaitu

1. Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya (Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan).
2. Haryanto (Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Strategis).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Sumedang antara lain:

1. Mengkaji Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dalam menyusun program, kegiatan, dan pendanaan untuk pengembangan pariwisata kawasan wisata selama Pandemi COVID-19 dan *New Normal* khususnya di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
2. Mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengembangan dan pemulihan pariwisata di kawasannya selama Pandemi COVID-19 dan *New Normal*.
3. Mengkaji strategi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

E. Agenda Kunjungan Kerja

Melakukan pertemuan dengan Bupati Sumedang yang dihadiri oleh:

1. Sekda Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
3. Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya (Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan).
4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang.
6. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Kabupaten Sumedang, antara lain: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI), Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Hotel *Human Resources Managers Association*

(HHRMA), Himpunan Penulis Pariwisata (HPP), Generasi Pesona Indonesia (GenPI).

7. Tinjauan lapangan obyek-obyek wisata di Kabupaten Sumedang, diantaranya Kampung Buricak Burinong, Lokasi Landing Paralayang Pasir Cinta, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) DAM Jatigede.

II. ISI LAPORAN

A. Kondisi Objektif Pariwisata di Kabupaten Sumedang

1. Data Informasi dan Temuan

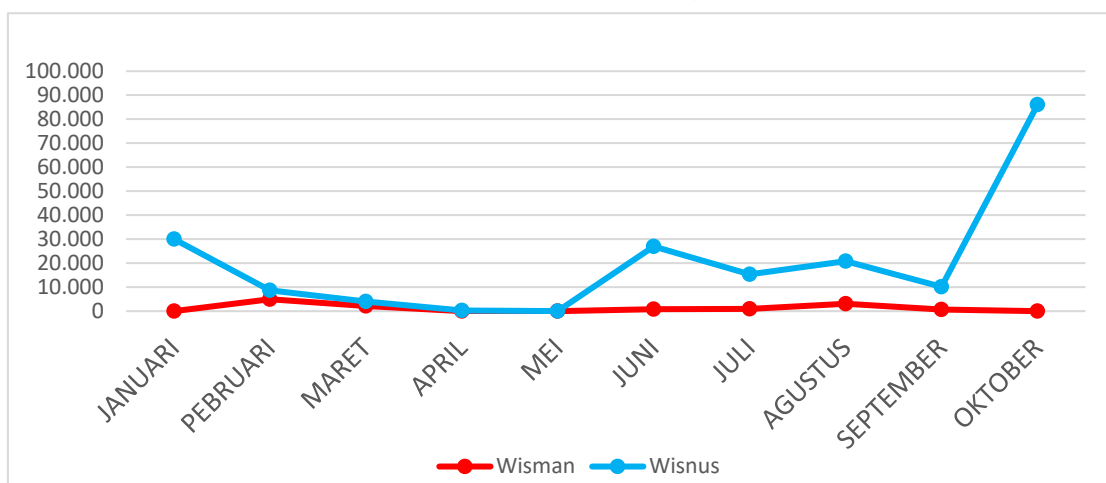
- a. Berikut beberapa regulasi yang menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengatasi dampak COVID-19 khususnya untuk sektor kesehatan, ekonomi, sosio-kultural dan terutama melindungi sektor pariwisata:
 - 1) Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443/KEP.397-BPPD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Deseases* 2019 Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - 3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jaminan Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - 4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Daerah Berdasarkan Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak Atau Kondisi Tertentu Objek Pajak;
 - 5) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - 6) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - 7) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- b. Pemerintah Kabupaten Sumedang menyampaikan telah gencar melakukan sosialisasi baik itu di tempat pusat keramaian, destinasi wisata wisata, hotel, dan restoran serta terus menjalin komunikasi dengan semua komponen dalam upaya pengendalian COVID-19.

- c. Jumlah kunjungan ke objek wisata di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari sejak bulan Februari sampai dengan September 2020, dan bulan Oktober – November 2020 mulai mengalami peningkatan khususnya kunjungan dari wisatawan nusantara (Wisnus) atau lokal di beberapa destinasi wisata di Kabupaten Sumedang, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dan gambar di bawah ini:

*Tabel
Perkembangan Kunjungan Wisma dan Wisnus*

WISATAWAN	BULAN										JUMLAH
	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
Wisman	3	4.956	2.165	0	0	867	940	3.076	632	0	12.639
Wisnus	29.957	8.624	4.065	207	25	26.950	15.374	20.872	10.124	85.993	202.191
	JUMLAH										214.830

*Gambar
Perkembangan Kunjungan Wisman dan Wisnus
di Kabupaten Sumedang*



- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) tahun 2020-2025, yang disusun menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi COVID-19, dengan memasukkan daya dukung IT, daya dukung potensi pariwisata dan budaya Sumedang sebagai pusat pengembangan budaya tradisi Sunda dan dilengkapi program mitigasi kepariwisataan;
- e. Upaya penguatan daya dukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah melakukan program penguatan 5 lembaga mitra strategis pariwisata di antaranya PHRI, HPI, ASITA, Kompepar/Pokdarwis juga BPPD Kabupaten Sumedang, selain

itu juga menjalin kerja sama dengan UPI Sumedang dan STP Bandung (NHI) untuk pembukaan program Strata 1 Industri Pariwisata;

- f. Pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini sedang fokus mengembangkan KEK Jatigede menjadi destinasi wisata. Destinasi KEK Jatigede akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata di antaranya, *Hilltop Resort, Glamping, Floating Market, Golf-Villa, Flower Park, Agrotourism, Water Sport and Outbond, Waterfront Resort, Floating Iconic Museum, Hot Air Ballon* dan *Sculture and Cultural Park*. Menopang KEK Jatigede sebagai pusat destinasi wisata juga telah dibangun beberapa kawasan wisata penyangga di sekitarnya;
- g. Tahun 2020 Kabupaten Sumedang mendapat bantuan Rp. 15 M dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penataan Kawasan Wisata Buricak Burinong dan kembali akan mendapatkan bantuan Rp. 15 M pada tahun 2021.

2. Permasalahan dan Kendala

- a. Akibat dari dampak pandemi COVID-19, terjadi penurunan drastis jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumedang kurang lebih 60% sampai 85%;
- b. Jumlah okupansi hunian hotel dan kunjungan rumah makan/restoran di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan yang signifikan sehingga mempengaruhi ekonomi masyarakat dan pendapatan Kabupaten Sumedang dari sektor penerimaan pajak;
- c. Beberapa kawasan destinasi wisata di Kabupaten Sumedang sudah dilengkapi dengan kajian *Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)*, sehingga dari segi kelayakan memang sudah dapat dianalisa kelayakannya dan secara teknis sudah dirancang sesuai dengan *landscape* dan aturan Zonasi Tata ruang yang sesuai RTRW dan RDTR, namun masih ditemukan kendala belum tersedianya jalan penghubung yang mengintegrasikan lokasi wisata dengan lokasi wisata lainnya;
- d. Dukungan pendanaan pengembangan wisata Kabupaten Sumedang masih belum maksimal dan belum mencukupi jika hanya mengandalkan anggaran APBD.

B. Masukan dan Pandangan Pemangku Pariwisata Kabupaten Sumedang

1. Bupati Sumedang menyampaikan beberapa hal yang menjadi masukan dan pandangan serta harapan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumedang, di antaranya:

- a. Kabupaten Sumedang berada di lokasi strategis sehingga dalam upaya menggenjot industri pariwisatanya harus ditunjang dengan dukungan keberadaan bandara, pelabuhan, dan terminal bus yang memadai;
- b. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumedang membutuhkan dukungan sebagai berikut:
 - 1) penataan terminal bis di dalam Kota Sumedang;
 - 2) akses ke Kabupaten Sumedang dari dan ke Bandara Kertajati perlu pembenahan;
 - 3) Jalan Tol Cisundawu yang meliputi 6 *interchange* (exit tol) perlu dirancang untuk menjadi akses wisatawan menuju ke destinasi-destinasi wisata di Sumedang.
- c. Kabupaten Sumedang membutuhkan dukungan dari Komisi X DPR RI, Kemenparekraf RI, Kemenpora RI dan Kementan RI untuk mendukung upaya Kabupaten Sumedang mengembangkan beberapa lokasi-lokasi destinasi wisata baru (Kampung Buricak Burinong, fasilitas Paralayang di Pasir Cinta, DAM Jatigede, serta Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pembangunan menara Kujang Kembar dan Masjid Al Kamil Lingkar Timur Jatigede), wisata sport, agro-wisata yang sedang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- d. Kabupaten Sumedang sedang menuju menjadi kabupaten pariwisata sebagai fokus utama sejak tahun 2019, untuk menunjang misi tersebut semua dinas di Pemerintah Kabupaten Sumedang akan diorientasikan untuk mendukung Sumedang menjadi kabupaten wisata;
- e. Sektor pariwisata dan industri menjadi sektor strategis Kabupaten Sumedang, karena terletak di koridor ekonomi Jawa dengan diapit tiga kota metropolitan yaitu Jakarta Raya (Jabodetabek), Bandung Raya dan Cirebon Raya;
- f. Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang menjadikan sektor *advertising* dan *selling* menjadi fokus pengembangan pariwisata;
- g. Meminta dukungan kepada Komisi X DPR RI untuk pengembangan pembangunan KEK Jatigede menjadi kawasan wisata danau berkelas dunia (*a world class lakeside resort destination*);
- h. Kabupaten Sumedang menjadikan sektor pariwisata selain sektor industri untuk menjadi potensi utama meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan;
- i. Kawasan industri KEK Jatigede akan diintegrasikan dengan pengelolaan pariwisata, yang secara kelembagaannya juga akan melibatkan pemangku pariwisata dan kampus.

2. Kadis Pariwisata Kabupaten Sumedang menyampaikan beberapa usulan dan harapan sebagai berikut:
 - a. Lembaga PHRI dan beberapa *stake holder* pariwisata di Kabupaten Sumedang saat ini baru tumbuh dan masih dalam tahap, maka dibutuhkan bimbingan dari Kemenparekraf RI;
 - b. Pariwisata Kabupaten Sumedang membutuhkan dukungan dari lintas kementerian yang saat ini sedang mengembangkan wisata alam, wisata agro, wisata budaya dan wisata olahraga.
3. Kadin dan PHRI Kabupaten Sumedang menyampaikan beberapa usulan dan harapan sebagai berikut:
 - a. Memohon ada bantuan langsung untuk pengembangan destinasi wisata baik dari sisi pembangunan fisik wisata dan pengembangan sumber daya manusia sektor pariwisata;
 - b. Pengusaha adalah mata rantai dari sektor pariwisata, maka dibutuhkan keterlibatan dan koordinasi lebih intens dengan Pemerintah Sumedang
 - c. Tingkat okupansi hotel di Kabupaten Sumedang saat ini hanya 30 persen pertanda bahwa Kabupaten Sumedang belum menjadi wilayah destinasi wisata di Jawa Barat, maka dibutuhkan dukungan program dan anggaran promosi wisata yang lebih banyak;
 - d. Memohon agar pelatihan peningkatan sumber daya manusia pengelola sektor pariwisata dilaksanakan dan diperbanyak kuotanya untuk Kabupaten Sumedang.

III. KESIMPULAN

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Pariwisata ke Kabupaten Sumedang ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan dan mempersiapkan agenda program pariwisata yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan masyarakat;
- B. Pemerintah Daerah kabupaten Sumedang telah membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) tahun 2020-2025, yang disusun menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi COVID-19, dengan memasukkan daya dukung IT dan dilengkapi program Mitigasi Kepariwisata;
- C. Kabupaten Sumedang memiliki potensi destinasi wisata yang potensial, kaya dan beragam, baik wisata alam, agro-wisata, wisata olahraga, dan budaya. Di antara destinasi wisata potensial dan unggulan yaitu keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jatigede. Namun pengelolaan destinasi pariwisata di KEK Jatigede masih menemukan

beberapa kendala dan permasalahan di antaranya akses transportasi yang masih sulit dan masih perlu dukungan pembangunan fasilitas wisata agar unsur amenities, atraksi dan aksesibilitas (3A) terpenuhi;

- D. Perlu keterlibatan semua komponen, baik pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha pariwisata, ekonomi kreatif dan masyarakat untuk memajukan pariwisata Kabupaten Sumedang.

IV. REKOMENDASI

- A. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI, Kemendikbud RI, Kementan RI dan Kemenpora RI untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengembangkan potensi wisatanya, khususnya pada jenis wisata alam, wisata edukasi-budaya, agro-wisata dan wisata olahraga;
- B. Mendesak Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang untuk melakukan langkah-langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur penopang untuk mengatasi kendala akses dan akomodasi di Destinasi Wisata KEK Jatigede;
- C. Komisi X meminta kepada Kemenparekraf RI untuk mengembangkan potensi desa-desa wisata dalam upaya memperkenalkan budaya tradisi bangsa dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa;
- D. Meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengelola dan merawat keberadaan Keraton dan Museum Sumedang Larang sesuai dengan standar pelayanan dan pengelolaan dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi dan budaya.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI.

Jakarta, 6 Desember 2020

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi x DPR RI**

**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338**